

**PERSEPSI MASYARAKAT DI RT 9 KELURAHAN TIMBANGAN
DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA
KEPOLISIAN SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002**

SKRIPSI

Oleh :

Selvia Elinda

Nomor Induk Mahasiswa 06111005026

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2016**

**PERSEPSI MASYARAKAT DI RT 9 KELURAHAN TIMBANGAN
DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA
KEPOLISIAN SESUAI DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 2002**

SKRIPSI

Oleh

Selvia Elinda


Nomor Induk Mahasiswa 06111005026

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Mengesahkan:

Pembimbing I



Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd
NIP 196312211989112001

Pembimbing II



Drs. Alfiandra, M.Si
NIP 196702051992031004

Mengetahui:

Ketua Jurusan IPS,



Dr. Farida, M.Si
NIP 196027091987032002

Ketua Program Studi PPKn,



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP 197603052002121011

**PERSEPSI MASYARAKAT DI RT 9 KELURAHAN TIMBANGAN
DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA
KEPOLISIAN SESUAI DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 2002**

Oleh
Selvia Elinda
Nomor Induk Mahasiswa 06111005026

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Mei 2016

TIM PENGUJI


1. Ketua : Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd.


2. Sekretaris : Drs. Alfiandra, M.Si


3. Anggota : Drs. Emil El Faisal, M.Si.


4. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.

5. Anggota : Kurnisar, S.Pd., M.H.










Inderalaya, Juli 2016

Mengetahui,
Ketua Program Studi PPKn,


Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP 197603052002121011

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada, Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd dan Drs. Alfiandara, M.Si, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kurnisar, S.Pd., M.H., Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Drs. Emil El Faisal, M.Si., Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., dan Kurnisar, S.Pd., M.H., anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jhon Kenedy sebagai Ketua RT 9 diKelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utarayang telah memberikan kemudahan dalam pengambilan data.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Inderalaya, Juli 2016

Penulis

SE

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Sebagai rasa syukur pada-Mu Ya Allah, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua orang tua tercinta (Almarhum) Ayahanda Arianto dan Ibunda Indrawati, yang menyangiku dan senantiasa mengiringi doa di setiap langkahku, selalu memberikan semangat dan motivasi di setiap hariku, memberiku inspirasi dalam hidup ini, membimbingku agar selalu optimis, dan mengingatkanku agar selalu bersyukur dan dekat pada Allah SWT.
- Saudara kandungku Rafiqoh Rahmi, SH , Khairu Walidi, Fadilah Rahma terimakasih selalu memberi semangat, memotivasi, serta mendoakan kesuksesanku.
- Kedua dosen pembimbingku Ibu Dr. Hj.Umi Chotimah, M.Pd dan Bapak Drs. Alfiandra, M.Si. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.
- Seluruh dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Bapak Drs. H. Mulkan Mulyadi HD, Bapak Drs.Emil El Faisal, M.Si , Ibu Dra.Sri Artati Waluyati,M.Si, Bapak Kurnisar,S.Pd.,M.H., Bapak Sulkipani,S.Pd.,M.Pd, Ibu Husnul Fatihah,S.Pd.,M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah,S.Pd.,M.Pd, Ibu Puspa Dianti,S.Pd.,M.Pd dan Ibu Camelia,S.Pd.,M.Pd). Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
- Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 terima kasih atas hari-hari indah yang pernah kita lewati bersama dalam suka dan duka semoga ukhuwah ini akan tetap terjalin diantara kita.
- Kakak dan adik tingkat angkatan 2010, 2012, 2013, 2014, dan 2015 terima kasih atas semangat dan doanya.
- Almamater yang selalu kubanggakan.

Motto

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d: 11)

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persepsi Masyarakat	
2.1.1 Pengertian Persepsi	9
2.1.2 Proses Terbentuknya Persepsi.....	9
2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	11
2.1.4 Prinsip Dasar Persepsi.....	12
2.1.5 Cara Pengukuran Persepsi.....	13
2.2 Kinerja Kepolisian Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	
2.2.1 Indikator Kinerja Kepolisian.....	14
2.2.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	18
2.2.3 Fungsi POLRI Dalam Bidang Pemeliharaan Keamanan Masyarakat...	19

2.2.4 Pembagian Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab POLRI berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor No23 Tahun 2010 Pasal 1	21
2.3 Tingkat Pendidikan	
2.3.1 Pengertian Tingkat Pendidikan	24
2.3.2 Indikator Tingkat Pendidikan.....	24
2.4 Hubungan Persepsi dan Tingkat Pendidikan.....	26
2.5 Persepsi Masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Kepolisian Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	27
2.6 Anggapan Dasar	28
2.7 Hipotesis.....	28
2.8 Kerangka Berpikir	29

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian	32
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	32
3.2.1 Persepsi Masyarakat RT 9 Kelurahan Timbangan Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan	32
3.2.2 Kinerja Kepolisian Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	33
3.3 Populasi dan Sampel	
3.3.1 Populasi	38
3.3.2 Sampel.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	
3.4.1 Teknik Dokumentasi	41
3.4.2 Teknik Angket (Kuesioner).....	41
3.5 Teknik Analisa Data	
3.5.1 Data Angket	43
3.5.1.1 Validasi Angket.....	44
3.5.1.2 Reabilitas Angket.....	44

3.5.1.3 Pengolahan Data Berdasarkan Rumus Frekuensi Relatif.....	45
3.5.1.4 Uji Normalitas Data	47
3.5.1.5 Uji Homogenitas Varians	47
3.5.1.6 Uji ANOVA	48
3.5.1.7 Uji Tukey	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian.....	50
4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian	
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	51
4.2.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Timbangan	51
4.2.1.2 Keadaan Fisik Kelurahan Timbangan	52
4.2.1.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Timbangan	53
4.2.1.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Timbangan	53
4.2.1.5 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Timbangan	54
4.2.1.6 Jumlah Penduduk RT 9 Kelurahan Timbangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Angket (Kuesioner)	55
4.2.2.1 Deskripsi Hasil Data Angket.....	55
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian	
4.3.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	81
4.3.2 Analisis Data Hasil Angket.....	81
4.3.2.1 Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Di RT 9 Kelurahan Timbangan Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Terhadap Kinerja Kepolisian Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	81
4.3.2.2 Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Di RT 9 Kelurahan Timbangan Pada Tingkat Pendidikan SMP Terhadap Kinerja Kepolisian Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.....	86

4.3.2.3 Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Di RT 9 Kelurahan Timbangan Pada Tingkat Pendidikan SMA Terhadap Kinerja Kepolisian Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.....	91
4.3.2.4 Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Di RT 9 Kelurahan Timbangan Pada Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi (PT) Terhadap Kinerja Kepolisian Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	96
4.3.3 Analisis Pengolahan data Berdasarkan Rumus Frekuensi Relatif	102
4.4 Pengujian Persyaratan Instrumen	
4.4.1 Uji Validitas	104
4.4.2 Uji Reabilitas.....	107
4.4.3 Uji Normalitas Data	107
4.4.4 Uji Homogenitas Varians	108
4.4.5 Uji ANOVA	109
4.4.6 Uji Tukey	109
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	111

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	115
5.2 Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA	116
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Hasil Studi Pendahuluan	6
Tabel 2.1 Klasifikasi Pernyataan dan Skor Nilai.....	14
Tabel 3.1 Indikator dan Deskriptor Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel 3.2 Indikator dan Deskriptor Kinerja Kepolisian.....	34
Tabel 3.3 Jumlah Populasi Penelitian Di RT 9 Kelurahan Timbangan Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan	39
Tabel 3.4 Sampel Penelitian Masyarakat RT 9 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Tabel 3.5 Klasifikasi Pernyataan dan Skor Nilai	42
Tabel 3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
Tabel 3.7 Klasifikasi Pernyataan dan Skor Penilaian	46
Tabel 3.8 Kriteria Interpretasi Skor Presentase.....	46
Tabel 3.9 Kriteria Penilaian Skor Presentase	47
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	51
Tabel 4.2 Keadaan Bangunan dan Fasilitas di Daerah Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara	52
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara.....	53
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Tertinggi Penduduk Daerah Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara	53
Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara.....	54
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Masyarakat RT 9 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara.....	55
Tabel 4.7 Klasifikasi Pernyataan dan Skor Nilai	56
Tabel 4.8 Kriteria Interpretasi Skor Presentase.....	56
Tabel 4.9 Kriteria Persepsi Berdasarkan Interpretasi Skor Presentase	57

Tabel 4.10	Polisi Sudah Menerima Segala Bentuk Laporan Masyarakat Dalam Waktu 24 Jam	58
Tabel 4.11	Polisi Sudah Bertanggung Jawab Memelihara Keamanan di Lingkungan Masyarakat.....	58
Tabel 4.12	Polisi Sudah Menciptakan Lingkungan yang Aman Bebas Dari Segala Bentuk Tindak Kejahatan	59
Tabel 4.13	Polisi Telah Mampu Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan.....	60
Tabel 4.14	Penyelesaian Kasus Kejahatan Dikerjakan Polisi sesuai denganKeahliannya	60
Tabel 4.15	Penyelesaian Kasus Kejahatan Dikerjakan Polisi sesuai dengan Pengetahuannya	61
Tabel 4.16	Polisi Sudah Turun Tangan Langsung Ke Tempat Kejadian Perkara (TKP)	61
Tabel 4.17	Polisi Cepat Tanggap Melakukan Penanganan Terhadap Korban.....	62
Tabel 4.18	Polisi Segera Mencari Bukti-Bukti Tambahan Atas Tindak Kejahatan yang Dilaporkan	63
Tabel 4.19	Hasil Penyelidikannya Diberitahukan Secara Terbuka.....	63
Tabel 4.20	Penanganan Kasus Dikerjakan Polisi sesuai dengan Prosedur yang Benar.....	64
Tabel 4.21	Polisi Sudah Bekerjasama Langsung dengan Masyarakat Dalam Menangani Kasus yang Terjadi di Lingkungan Masyarakat.....	64
Tabel 4.22	Proses Penyelesaian Segala Urusan di POLSEK Sangat Lancar Tidak Berbelit-Belit	65
Tabel 4.23	Polisi Tidak Pernah Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Menyelesaikan Tugas.....	66
Tabel 4.24	PolisiSudah Melakukan Razia Rutin dengan Segala Bentuk Sasaran Tindak Pidana	66
Tabel 4.25	Polisisudah Melakukan Patroli Rutin Pada Jam-Jam Rawan Yaitu Dari Jam 09.00-15.00 dan 21.00-23.00	67

Tabel 4.26	Polisi Sudah Mengadakan Program Penyuluhan Tentang Bahaya-Bahaya Dari Tindak Kejahatan Selama 1 Minggu Sekali Di Lingkungan Masyarakat	67
Tabel 4.27	Polisi Berperilaku Ramah dengan Masyarakat	68
Tabel 4.28	Polisi Bersikap Sama Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.....	69
Tabel 4.29	Polisi Menjaga Kehormatan Nama Baik Kepolisian Dalam Bersikap.....	69
Tabel 4.30	Masyarakat yang Datang Membutuhkan Pelayanan Diperlakukan Secara Baik	70
Tabel 4.31	Masyarakat Percaya terhadap Kualitas Kinerja Polisi Dalam Menjaga Keamanan Masyarakat.....	70
Tabel 4.32	Polisi Menyediakan Nomor Telepon Siap Jaga 24 Jam Sehingga Mudah Dihubungi	71
Tabel 4.33	Polisi Bersikap Transparan Dalam Menangani Keluhan Masyarakat	71
Tabel 4.34	Polisi Sudah Membuat Kebijakan Berdasarkan Tuntutan Masyarakat	72
Tabel 4.35	Polisi Sudah Melaksanakan Tugasnya sesuai dengan Keinginan Masyarakat.....	73
Tabel 4.36	Polisi Sudah Membuat Laporan dengan Baik Tentang Hasil Kerjanya Untuk Bisa Diketahui Oleh Masyarakat	73
Tabel 4.37	Polisi Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Agar Mewaspadaai Tindak Kejahatan yang Kerap Terjadi Di Lingkungan Masyarakat	74
Tabel 4.38	Polisi Tanggung Jawab Terhadap Tugasnya dengan Datang Tepat Waktu Bekerja Sesuai dengan Jam Kerjanya	74
Tabel 4.39	Polisi Menyelesaikan Kasus Secara Profesional Tanpa Ada Indikasi Kecurangan Dalam Menegakan Hukum.....	75
Tabel 4.40	Penyelesaian Kasus Diselesaikan Polisi dengan Tepat Waktu	76

Tabel 4.41	Polisi Sudah Siap Menerima Resiko Jika Melakukan Kesalahan Dalam Menyelesaikan Tugasnya	76
Tabel 4.42	Polisi Sudah Mengutamakan Kepentingan Masyarakat	77
Tabel 4.43	Polisi Menjalankan Tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	77
Tabel 4.44	Polisi Cepat Tanggap Dalam Menanggapi Permasalahan di Masyarakat	78
Tabel 4.45	Polisi Bersikap Tegas Dalam Merespon Pengaduan Masyarakat	78
Tabel 4.46	Polisi Sudah Memberikan Penyelesaian yang Tepat Dalam Mengatasi Permasalahan Di Masyarakat	79
Tabel 4.47	Polisi Sudah Memiliki Jiwa Melayani dengan Sepenuh Hati Dalam Merespon Keluhan Dari Masyarakat	80
Tabel 4.48	Polisi Merespon Setiap Keluhan Dari Masyarakat dengan Baik	80
Tabel 4.49	Indikator : Produktivitas (Terkait dengan Kemampuan Untuk Menghasilkan Sesuatu)	86
Tabel 4.55	Indikator : Produktivitas (Terkait dengan Kemampuan Untuk Menghasilkan Sesuatu)	82
Tabel 4.56	Indikator : Kualitas Layanan (Terkait dengan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang Diberikan)	82
Tabel 4.57	Indikator : Akuntabilitas (Otoritas dan Jaminan Terkait dengan Batasan Wewenang dan Tanggung Jawab)	84
Tabel 4.58	Indikator : Responsibilitas (Terkait dengan Kemampuan Menyelesaikan Tindak Kejahatan)	84
Tabel 4.59	Indikator : Responsivitas (Terkait dengan Daya Tanggap dan Empati Kinerja Kepolisian Dalam Menjalankan Tugasnya)	85
Tabel 4.60	Rata-Rata Persepsi Masyarakat RT 9 terhadap Kinerja Kepolisian Sebagai Badan Pemeliharaan Keamanan Masyarakat Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar	86
Tabel 4.61	Indikator : Produktivitas (Terkait dengan Kemampuan Untuk Menghasilkan Sesuatu)	87

Tabel 4.62	Indikator : Kualitas Layanan (Terkait dengan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang Diberikan).....	87
Tabel 4.63	Indikator :Akuntabilitas (Otoritas dan Jaminan Terkait dengan Batasan Wewenang dan Tanggung Jawab)	89
Tabel 4.64	Indikator :Responsibilitas (Terkait dengan Kemampuan Menyelesaikan Tindak Kejahatan)	89
Tabel 4.65	Indikator :Responsivitas (Terkait dengan Daya Tanggap dan Empati Kinerja Kepolisian Dalam Menjalankan Tugasnya).....	90
Tabel 4.66	Rata-Rata Persepsi Masyarakat RT 9 terhadap Kinerja Kepolisian Sebagai Badan Pemeliharaan Keamanan Masyarakat Pada Tingkat Pendidikan SMP	91
Tabel 4.67	Indikator : Produktivitas (Terkait dengan Kemampuan Untuk Menghasilkan Sesuatu).....	92
Tabel 4.68	Indikator : Kualitas Layanan (Terkait dengan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang Diberikan).....	92
Tabel 4.69	Indikator :Akuntabilitas (Otoritas dan Jaminan Terkait dengan Batasan Wewenang dan Tanggung Jawab)	94
Tabel 4.70	Indikator :Responsibilitas (Terkait dengan Kemampuan Menyelesaikan Tindak Kejahatan)	94
Tabel 4.71	Indikator :Responsivitas (Terkait dengan Daya Tanggap dan Empati Kinerja Kepolisian Dalam Menjalankan Tugasnya).....	95
Tabel 4.72	Rata-Rata Persepsi Masyarakat RT 9 terhadap Kinerja Kepolisian Sebagai Badan Pemeliharaan Keamanan Masyarakat Pada Tingkat Pendidikan SMA.....	96
Tabel 4.73	Indikator : Produktivitas (Terkait dengan Kemampuan Untuk Menghasilkan Sesuatu)	97
Tabel 4.74	Indikator : Kualitas Layanan (Terkait dengan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang Diberikan).....	97
Tabel 4.75	Indikator : Akuntabilitas (Otoritas dan Jaminan Terkait dengan Batasan Wewenang dan Tanggung Jawab).....	99

Tabel 4.76 Indikator : Responsibilitas (Terkait dengan Kemampuan Menyelesaikan Tindak Kejahatan).....	99
Tabel 4.77 Indikator : Responsivitas (Terkait dengan Daya Tanggap dan Empati Kinerja Kepolisian Dalam Menjalankan Tugasnya).....	100
Tabel 4.78 Rata-Rata Persepsi Masyarakat RT 9 terhadap Kinerja Kepolisian Pada Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi (PT).....	101
Tabel 4.79 Kriteria Interpretasi Skor Presentase.....	102
Tabel 4.80 Kriteria Penilaian Skor Presentase.....	102
Tabel 4.81 Rata-Rata Persepsi Masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan terhadap Kinerja Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pada Masyarakat yang Lulusan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi (PT).....	103
Tabel 4.82 Hasil Uji Validitas Angket Variabel.....	104
Tabel 4.83 Interpretasi Validitas Angket Variabel.....	106
Tabel 4.84 Hasil Uji Reliabilitas Angket Variabel.....	107
Tabel 4.85 Uji Normalitas Data.....	108
Tabel 4.86 Uji Homogenitas Varians.....	108
Tabel 4.87 Uji ANOVA.....	109
Tabel 4.88 Uji Tukey Pada Ouput Post Hoc Tests.....	110
Tabel 4.89 Homogeneous Subsets.....	111

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 : Kerangka Berpikir	30
Bagan 2 : Alur Penelitian	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Seminar Usul Judul Penelitian.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Usul Penelitian.
- Lampiran 4 : Perbaikan Hasil Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Daftar Hadir Dosen Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Daftar Hadir Mahasiswa Peserta Seminar Proposal
- Lampiran 8 : Daftar Hadir Mahasiswa Seminar Proposal
- Lampiran 9 : Surat Izin Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Hasil Penelitian.
- Lampiran 11 : Daftar Hadir Dosen Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 12 : Daftar Hadir Mahasiswa Peserta Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 13 : Daftar Hadir Mahasiswa Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14 : Perbaikan Hasil Seminar Hasil
- Lampiran 15 : Surat Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 16 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Dekan FKIP UNSRI
- Lampiran 17 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kantor Kelurahan
Timbangan
- Lampiran 18 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Dari Kantor
Kelurahan Timbangan
- Lampiran 19 : Lembar Persetujuan Ujian Akhir Program Sarjana
- Lampiran 20 : Daftar Hadir Dosen Penguji Dalam Ujian Skripsi
- Lampiran 21 : Daftar Hadir Mahasiswa Peserta Ujian Akhir Program Strata-1
(S1) Kampus Indralaya FKIP UNSRI
- Lampiran 22 : Bukti Perbaikan Skripsi
- Lampiran 23 : Kisi-Kisi Instrumen Angket
- Lampiran 24 : Angket Penelitian
- Lampiran 25 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 26 : Gambar-gambar Kegiatan Penelitian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan ditinjau dari tingkat pendidikan terhadap kinerja kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikannya yang berjumlah 254 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *disproportionate stratified random sampling* serta menentukan jumlahnya dengan menggunakan penarikan sampel 10% dari populasi penelitian, yaitu berjumlah 138 orang terdiri dari masyarakat lulusan SD 42 orang, SMP 33 orang, SMA 37 orang dan perguruan tinggi 26 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan angket. Data yang di analisis menggunakan uji anova dan uji tukey. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari masyarakat yang berpendidikan tinggi, sedang dan rendah terhadap kinerja kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di RT 9 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara. Secara umum persepsi masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan terhadap kinerja kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat yaitu negatif dengan nilai rata-rata persentasenya 62.3%. Persepsi masyarakat lulusan SD 46.8%, SMP 59.5%, SMA 65.3%, serta pada tingkat perguruan tinggi 77.6%. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan maka persepsi yang diberikan terhadap kinerja kepolisian semakin positif, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan maka persepsi yang diberikan terhadap kinerja kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat semakin negatif

Kata Kunci: persepsi masyarakat, tingkat pendidikan, kinerja kepolisian

ABSTRACT

This research aims to know society perception in RT 9, Timbangan subdistrict, was observed from education level toward police performance based on constitution number 2, 2002. The population in this research is all of society in RT 9, Timbangan Sub district, North Indralaya district that clustered based on education level totally 254 people. The research sampling is using *disproportionate stratified random sampling* technic and determining it's total by using 10 % sample collecting from society population. The total is 138 people that 42 people as elementary school (SD) student, 33 people as Junior High School (SMP) student, 37 people as Senior High School (SMA) student, and 26 people as university student. The technic of data collecting in this research is used documentation and questioner. The data was analyzed using anova and tukey test. According to analyzing data and discussion, can be concluded that there is significant differences perception from society who's in high, middle, and low educated toward police performance as society security maintenance agency based on constitution number 2, 2002, in RT 9, Timbangan Sub district, North Indralaya District. Generally, society perception in RT 9, Timbangan Sub district, North Indralaya district toward police performance as security maintenance agency is negative perspective with 62.3 % perception average value. The society in 46,8 % as Elementary School (SD) student, 59,5 % as Junior High School (SMP) student, 65,3 % as Senior High School (SMA) student, and 77,6 % on university level. It means the higher their education so the higher their value.

Key words : *society perception, education level, police performance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan warga negara sehingga menjadikan hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara Republik Indonesia juga bertujuan untuk dapat melindungi keamanan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Untuk dapat melindungi dan mewujudkan keamanan warga negara tersebut maka diperlukannya badan keamanan negara yang dapat menjamin serta melindungi keamanan warga negaranya. Badan keamanan negara tersebut salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum,” (dalam Nuansa Aulia, 2006:29).

Kepolisian mempunyai peranan penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Polisi dituntut bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Bahtiar dalam Khoidin (2014: 25) mengemukakan bahwa :

“Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram”.

Selanjutnya tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 (dalam Khoidin, 2014: 68) yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor pada Pasal 1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 1 ini dapat disimpulkan bahwa :

“Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar POLRI yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah ditingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan POLDA yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga POLRES yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan POLSEK dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya”.

<https://dodisyahputra.wordpress.com/2012/04/08/tugas-dan-fungsi-satuan-polri/> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2014

Dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas dapat terlihat jelas bahwa jenjang terkecil dari kepolisian yang mengatur daerah kecamatan adalah POLSEK. Polisi Sektor (POLSEK) merupakan satuan kepolisian yang berada di tingkat kecamatan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. POLSEK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya

akan lebih berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu kinerja polisi sebagai aparat negara dalam mengamankan lingkungan masyarakat dari segala bentuk tindak kejahatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi warga masyarakatnya. They dalam Toha (1996:58) menggolongkan lima unsur pelayanan yang memuaskan yaitu:

“Merata dan sama, diberikan tepat pada waktunya, memenuhi jumlah yang dibutuhkan, berkesinambungan, dan selalu meningkatkan kualitas serta pelayanan. Setiap orang mengharapkan pelayanan yang unggul, yaitu suatu sikap atau cara seseorang dalam melayani pelanggan secara memuaskan”.

Bila pelayanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan akan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan masyarakat, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya layanan yang diterima lebih rendah dari pada diharapkan, maka kualitas/layanan akan dipersepsikan buruk. Pelayanan yang baik merupakan hak penuh masyarakat yang harus dijawab dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rotua Ernawaty Silaen Mahasiswa FISIP 2010 Universitas Sriwijaya yang berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Profesionalitas Polisi dalam Penegakan Hukum menyimpulkan bahwa:

“Persepsi masyarakat terhadap profesionalitas polisi dalam penegakan hukum di Poltabes Palembang secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dengan bobot nilai yang dimiliki dari semua indikator yang ada sebesar 235.1. Akan tetapi apabila dilihat dari perindikator masih ada pelayanan yang dilakukan oleh polisi yang dinilai masih cukup baik, yaitu pada indikator kenyamanan lingkungan, kecepatan pelayanan, prosedur pelayanan dan kedisiplinan petugas pelayanan polisi.” (Rotua, 2010: 97-99)

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka di dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi ingin melihat kinerja kepolisian khususnya POLSEK sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan. Pada dasarnya tugas kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat adalah “membina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna

mewujudkan keamanan dalam negeri”. (<https://mayachitchatting.files.wordpress.com/2013/07/lampiran-p-baharkamperkap-21.pdf>) Diakses pada tanggal 28 Oktober 2014.

Dari tugas kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat di atas ada yang sudah dijalankan atau dilaksanakan oleh pihak polisi khususnya POLSEK Kecamatan Indralaya. Maka dari itu untuk membuktikan dan melihat tugas dan kinerja kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat tersebut maka pertama peneliti melakukan studi pendahuluan ke POLSEK Kecamatan Indralaya untuk memperoleh data program kerja dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat.

Adapun tugas dan program kerja yang telah dilaksanakan oleh pihak POLSEK Kecamatan Indralaya yaitu diantaranya apabila ada pengaduan dari masyarakat mengenai tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat polisi langsung memproses dan menindaklanjutinya. Polisi melakukan pencegahan dengan melakukan patroli siang dan malam, menghimbau poskamling serta melakukan penyelidikan sampai selesai apabila terjadi kasus tindak kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat. Polisi juga melakukan pembenahan pelayanan kepada masyarakat apabila kurang tanggapnya anggota kepolisian dalam menerima dan melayani pengaduan masyarakat yang tidak sesuai dengan prosedur, selanjutnya polisi melakukan penindakan kejahatan tertentu misalnya dengan melakukan pemberantasan serta sosialisasi atau arahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Kinerja kepolisian khususnya POLSEK sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan dapat dilihat dan dinilai dari seberapa baik kinerja kepolisian dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal pihak kepolisian menjalankan fungsinya tersebut, ternyata di masyarakat menimbulkan beragam persepsi. Dari tugas dan program kerja yang telah dilaksanakan oleh pihak POLSEK Kecamatan Indralaya di atas pada kenyataannya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang masih belum dilaksanakan di lingkungan masyarakat oleh pihak POLSEK Kecamatan Indralaya berdasarkan dari penilaian atau persepsi dari

masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan. Oleh karena itu untuk menunjang data dari pihak POLSEK Kecamatan Indralaya maka peneliti melakukan studi pendahuluan ke masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan dengan memberikan lembar studi pendahuluan (angket) untuk melihat pandangan dan tanggapan awal masyarakat terhadap kinerja kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan di masyarakat. Dari hasil studi pendahuluan (angket) yang peneliti lakukan terdapat beragam persepsi yang dikemukakan oleh masyarakat baik persepsi positif maupun persepsi negatif mengenai kinerja kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan.

Adapun persepsi masyarakat yang bersifat positif mengenai kinerja kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat salah satunya adalah polisi dipandang masyarakat bertindak cekatan atau sigap dan langsung menangani kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran lainnya yang sedang terjadi di lingkungan berdasarkan laporan yang diterimanya dari masyarakat. Selanjutnya persepsi masyarakat yang bersifat negatif yaitu:

1. Dalam mengayomi masyarakat polisi dinilai kurang ramah sehingga menimbulkan rasa takut masyarakat apabila harus berurusan dengan polisi.
2. Masyarakat menilai polisi belum melaksanakan patroli keliling diberbagai daerah sebagai bentuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat.
3. Kurangnya sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat mengenai program kerja kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat masih banyak tidak mengetahui kinerja-kinerja seperti apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi dan mengamankan masyarakat dari tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
4. Masyarakat beranggapan apabila ingin melaporkan kasus kejahatan yang telah terjadi maka mereka harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu sebelum pihak kepolisian bertindak menyelesaikan kasus pelanggaran yang telah terjadi.

(*Arsip Lembar Studi Pendahuluan*, pada 12 September 2014, pukul 10.46 WIB)

Keberagaman persepsi masyarakat di atas dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu faktor tingkat pendidikan masyarakat. Terdapat beberapa masyarakat yang mengetahui dan merasa puas tentang kinerja kepolisian sebagai

badan pemeliharaan keamanan masyarakat dan ada juga beberapa masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak puas tentang kinerja dari kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat. Hal tersebut wajar jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan mereka, menurut Notoatmodjo (2003:106) mengemukakan bahwa:

“Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin cenderung akan memiliki persepsi yang baik terhadap apa yang dipersepsikan dan sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin cenderung akan memiliki persepsi yang tidak baik terhadap apa yang dipersepsikan.”

Pada hasil lembar studi pendahuluan ke masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan didapat juga informasi bahwa masih ada masyarakat yang belum puas dengan kinerja kepolisian khususnya POLSEK sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat, untuk lebih jelasnya lihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 : Hasil Studi Pendahuluan

No	Responden	Tingkat Pendidikan	Persentase	Keterangan
1	Responden M	SD	40 %	Belum Puas
2	Responden S	SD	40 %	Belum Puas
3	Responden Z	SD	50 %	Belum Puas
4	Responden H	SD	60 %	Belum Puas
5	Responden K	SD	50 %	Belum Puas
6	Responden S	SD	50 %	Belum Puas
7	Responden SS	SD	40 %	Belum Puas
8	Responden S	SD	50 %	Belum Puas
9	Responden N	SD	50 %	Belum Puas
10	Responden B	SMP	60 %	Belum Puas
11	Responden H	SMP	60 %	Belum Puas
12	Responden UJ	SMP	50 %	Belum Puas
13	Responden ARA	SMP	50 %	Belum Puas
14	Responden MI	SMP	40 %	Belum Puas
15	Responden S	SMA	60 %	Sudah Puas
16	Responden MIA	SMA	70 %	Sudah Puas
17	Responden I	SMA	70 %	Sudah Puas
18	Responden H	SMA	70 %	Sudah Puas
19	Responden JK	SMA	70 %	Sudah Puas
20	Responden D	SMA	90 %	Sudah Puas
21	Responden R	Perguruan Tinggi	80 %	Sudah Puas
22	Responden Y	Perguruan Tinggi	90 %	Sudah Puas
23	Responden R	Perguruan Tinggi	100 %	Sudah Puas

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas masyarakat yang memberikan persepsi belum puas terhadap kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat adalah masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan yang lulusan SD dan SMP. Mereka belum memahami sepenuhnya tentang kinerja kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat serta tidak mengetahui program kerja apa saja yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dari segala bentuk tindak kejahatan. Namun hal tersebut berbeda dengan persepsi masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan yang lulusan SMA dan Perguruan Tinggi, sebagian besar dari mereka memberikan persepsi yang puas dalam menilai kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat sudah dijalankan dengan baik. Mereka merasa beberapa keluhan atau permasalahan di lingkungan masyarakat yang mereka laporkan ke pihak polisi telah terpenuhi dan ditanggapi dengan baik oleh pihak kepolisian. Akan tetapi dengan hal tersebut kinerja kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat tetap dituntut untuk dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugasnya di lingkungan masyarakat, karena kinerja kepolisian merupakan perilaku yang dapat diamati dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dari uraian hasil studi pendahuluan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat kecenderungan perbedaan persepsi dari masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan mulai dari masyarakat yang lulusan SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi terhadap kinerja kepolisian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Kepolisian Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan persepsi masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan ditinjau dari tingkat pendidikan terhadap kinerja kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan ditinjau dari tingkat pendidikan terhadap kinerja kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah dapat mendukung teori-teori yang berkenaan dengan studi persepsi masyarakat di RT 9 Kelurahan Timbangan ditinjau dari tingkat pendidikan terhadap kinerja kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat RT 9 Kelurahan Timbangan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang adanya kewenangan kepolisian dalam memelihara keamanan di lingkungan masyarakat yang dilindungi oleh hukum.

1.4.2.2 Bagi POLSEK Indralaya

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk kinerja anggota POLSEK Indralaya agar lebih baik lagi nantinya.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, diharapkan agar peneliti lebih memahami, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja kepolisian sebagai badan pemeliharaan keamanan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 di RT 9 Kelurahan Timbangan

DAFTAR PUSTAKA

- Ade N, Aditya. (2011). *Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Persepsi Orang Tua terhadap Nilai Anak dalam Keluarga di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010*. Skripsi Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (lib.unnes.ac.id/14664/).
- Ahmadroihan8. **Persepsi dalam Psikologi**. <http://ahmadroihan8.blogspot.com/2013/10/persepsi-dalam-psikologi-lengkap.html>. Diakses pada 16 September 2015, pukul 20.05 WIB
- Amilda, Yossy. (2011). *Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Kepolisian dalam Menegakkan Aturan berlalu Lintas di Kecamatan lahat*. Skripsi. Indralaya: FKIP Universitas Sriwijaya
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dodi Syahputra. (2012). **Tugas Dan fungsi Satuan POLRI**. <https://dodisyahputra.word.press.com/2012/04/08/tugas-dan-fungsi-satuan-polri>. Diakses pada 28 Oktober 2014
- Dwiyanto. (2001). *Reformasi Kinerja Birokrasi Publik Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eprints.NASKAH PUBLIKASI*. <http://eprints.ums.ac.id/30648/11/NASKAH-PUBLIKASI.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 19:10 WIB
- Jalaluddin, Rakhmat. (2005). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khoidin. (2014). *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Surabaya: Laksbang Grafika
- Lembaga Survei Indonesia. (2005). **Kinerja Kepolisian**. www.Isi.or.id/riset/39/kinerja-kepolisian. Diakses pada 7 Oktober 2015

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan, (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan*. Jakarta

Mayachitchatting. (2013). **Baharkam POLRI**. <https://mayachitchatting.files.wordpress.com/2013/07/lampiran-p-baharkamperkap-21.pdf>. Diakses pada 28 Oktober 2014.

Mastarmudi. (2009). **Persepsi Sosial**. <http://mastarmudi.blogspot.com/2009/12/persepsi-sosial.html> Diakses pada 15 September 2015, pukul 20.12 WIB

Medicastore. (2012). **Pengetahuan dan Hal yang Mempengaruhinya**. (<http://kmasyarakat.blogspot.co.id/2012/03zfsdgsfdgdsf.html?m=1>) Diakses pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 19.10

Moeheriono. 2012. *.Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers

Nasional Kompas. (2014). **Kinerja POLRI Dapat Rapor Merah Dari IPW**. www.nasionalkompas.com/read/2014/12/21/17393691/kinerja.Polri.dapat.rapor.merah.dari.IPW. Diakses pada 7 Oktober 2015

Notoatmodjo, S. (2003). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cetakan Kedua Jakarta: Rineka Cipta

Riduwan. 2011. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Riduwan. 2013. *Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: ALFABETA

Ridwan, Said. 2014. *Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik Di Kelurahan Penyengat Kota Tanjung Pinang*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang (<http://jurnal.umrah.ac.id>).

Silaen, Ernawaty, Rotua. 2010. Persepsi Masyarakat terhadap Profesionalitas Polisi dalam Penegakan Hukum. *Skripsi*. Indralaya: FISIP Universitas Sriwijaya

Slameto.2003.*Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2006. *UUD'45 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia

Thoah,Chabib.2002.*TeknikEvaluasi Pendidikan*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Universitas Sriwijaya. 2011. *Buku Pedoman Fakultas Keguruan dn Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya 2011/2012*. Inderalaya : Unsri

Undang-Undang Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2002. Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Undang-Undang dan Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Visimedia, 2008.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Voaindonesia. (2015). **Masih Tinggi Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Polisi**. www.voaindonesia.com/content/masih-tinggi-ketidakpuasan-masyarakat-terhadap-polisi-125737878/95670.html.Diakses pada 7 Oktober 2015

Walgito, B. 2003. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi Offset